

MEMAHAMI NU SEBAGAI MADZHAB PEMIKIRAN

Mengukuhkan Tradisi Memperkuat Relevansi



Abdul Mun'im DZ

Ketua Pucuk Pimpinan
Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN)NU
dan Pemimpin Redaksi NU Online.

Pengantar

Ketika seseorang berusaha menelaah *manhajul fikr* Nahdlatul Ulama (NU), maka secara sadar atau tidak, telah meletakkan NU sebagai sebuah madzhab pemikiran.¹ Sementara untuk menelaah sebuah madzhab pemikiran perlu memeriksa secara tekun berbagai unsurnya. Agar kajian ini runtut, maka sebelumnya

menelaah prinsip dasar dari *manhajul fikr* tersebut perlu terlebih dahulu menelaah epistemologi pemikiran yakni mengenai hakikat pemikiran itu sendiri, arah dan tujuan serta *manhaj* (metodologi) dalam pembentukan pemikiran tersebut.² Selain itu perlu juga menelaah sosiologi pemikiran, yakni proses sosial, politik serta kesejarahan terbentuknya madzhab pemikiran NU yang ada sekarang ini.

Selama ini memang telah banyak diekspos tentang epistemologi pemikiran NU, yang berupaya mengupas sumber pemikiran NU yakni al-Qur'an, Hadis, ijma dan qiyas, yang dipahami dalam ruang lingkup empat madzhab.³ Namun hingga saat ini masih sangat kurang perhatian terhadap proses penerapan *manhaj* tersebut dalam konteks kenusantaraan sebagaimana yang dilakukan dengan cara yang dinamis oleh para wali atau para ulama di Jawa, di Sumatera di Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara dan sebagainya. Karena, dengan sendirinya proses itu telah menggunakan *ghayah wal wasail* (cita-cita dan sarana)

¹ Madzhab dalam konteks ini bukan sebuah konsep yang meyeluruh dan baku, melainkan diartikan sebagai tradisi pemikiran yang tumbuh dan dikembangkan dalam lingkungan NU dari generasi ke generasi.

² Abid Al-Jabiri, *Madkhal ila Falsafatil 'Uhum*, (Beirut: Dirasah Wahdatul Arabiah, 1998), h. 20

³ Baca KH Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah Waljama'ah*, (Yogyakarta: LKPSM, 1999), h. 15

yang khas Nusantara. Tradisi tersebut kemudian dikristalisasi menjadi *manhaj* (metodologi) pemikiran NU yang dikembangkan dari waktu ke waktu. NU berdiri tahun 1926 untuk mengonsolidasi madzhab pemikiran yang telah berkembang selama beberapa abad itu, yang didahului dengan berdirinya lembaga Taswirul Afkar. Karena itu, NU juga dikenal sebagai Nahdlatul Afkar (kebangkitan pemikiran)

Khittah NU dengan tegas menunjukkan bahwa NU bukan sekadar organisasi sosial keagamaan, tetapi juga merupakan *school of thought* (madzhab pemikiran), yang dikembangkan, dipraktikkan, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik menghadapi persoalan keilmuan, dan sosial politik. Adanya pola pemikiran yang sistematis dan baku itu memberikan identitas ke-NU-an yang khas di tengah komunitas yang lain. Sementara bentuk ekspresinya adalah pemikiran NU yang lentur, moderat, pluralis, karena itu responsif terhadap setiap perkembangan.

Pada tahun 1980-an, persoalan *manhaj* pemikiran itu kembali muncul ke permukaan seiring dengan komitmen NU untuk kembali ke khittah 1926, melakukan pembaruan sosial, serta berupaya merespons persoalan politik yang timbul. Munculnya perdebatan tentang *manhaj* ini lebih didorong oleh kebutuhan praktis dan mendesak untuk melakukan pembaruan sosial, bukan sekadar sebuah *hillah ilmiah* (angan-angan akademik). Perkembangan pemikiran di NU lebih merupakan refleksi dari gerakan sosial, bukan merupakan renungan akademik

yang tidak berakar, yang berpretensi objektif, abstrak, distantif, dan bebas nilai.

Sebaliknya tradisi pemikiran dalam NU berkembang sarat komitmen, penuh militansi dan menyertakan *involvement* serta dikembangkan berdasarkan nilai etis yang berlaku. Semuanya berada dalam tataran ibadah dan *mujahadah*, sehingga pemikiran yang dikembangkan selalu mengintegrasikan antara pencapaian spiritual dan cita-cita sosial. Tanpa adanya kemampuan melihat prinsip dasar itu, tradisi pemikiran NU sulit dikenali dan sulit dinilai, atau bahkan dianggap tidak layak dinilai, bila dilihat dari kacamata pemikiran eksternal, mengingat pemikiran tersebut bersifat esoteris (ruhani).

Epistemologi Pemikiran NU

Tidak ada organisasi keagamaan yang begitu gigih, konsisten dan bersemangat mengukuhkan diri sebagai kelompok Ahlussunnah Waljama'ah kecuali NU, baik yang ada di struktur organisasi maupun di lingkungan pesantrennya. Sementara pemikiran Ahlussunnah Waljama'ah berusaha memadukan antara ekstrem *naqli* (dogmatis-tekstualis) dengan ekstrem *aqli* (rasionalis). Penetapan al-Qur'an, Hadits, ijma dan qiyas sebagai sumber dan metode pemikiran, merupakan bentuk dari sintesis dua kecenderungan tadi, sehingga bisa dikembangkan pemikiran secara lebih proporsional. Dengan demikian, problem akademik klasik itu relatif bisa diatasi. Demikian pula penerimaan keabsahan empat madzhab dalam pemikiran fiqh Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali,

yang memiliki spektrum yang berbeda-beda itu semakin memperlengkap watak kejamaah (inklusivisme) pemikiran NU.

Prinsip epistemologi pemikiran NU itu tercermin dalam paradigma pemikiran pesantren, sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum yang dikembangkan di sana, yang dikenal dengan *ulumud diniyah* (ilmu keagamaan). Ilmu tersebut diajarkan dan dipelajari dengan tujuan untuk mengenal hukum-hukum Allah, agar bisa menghindari larangan dan menjalankan perintahnya. Dalam taraf ilmu yang lebih tinggi, ilmu tasawuf misalnya dipelajari dan diamalkan dalam rangka untuk mengenal dan mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah. Seluruh proses itu dengan sendirinya dihayati sebagai sebuah bentuk ibadah.⁴ Dalam bidang tasawuf juga terdapat aliran dan madzhab yang beragam bahkan saling bertentangan. Tetapi dengan spirit kejamaah, NU berusaha memadukan sehingga terbentuklah *jam'iyah thariqat mu'tabarrah*.

Dengan epistemologi pemikiran semacam itu, maka metode belajar juga menjadi sangat berbeda dengan disiplin keilmuan yang lain. Kalau *ulumud dunyawiyyah-ijtimaiyyah* (ilmu kemasyarakatan) dipelajari dengan metode rasional-empirik, maka *ulumud diniyah* selain dipelajari secara rasional juga dipelajari secara spiritual, dengan melakukan

berbagai macam *riyadlah* (latihan), *tazkiyatun nafs* (penyucian diri) dengan melakukan *uzlah* (pengasingan diri)⁵ untuk memperoleh petunjuk langsung dari Allah, untuk mendapatkan barakah serta sebagai usaha untuk memperoleh *daqatil ma'ani* (makna terdalam) dari sebuah ilmu pengetahuan.

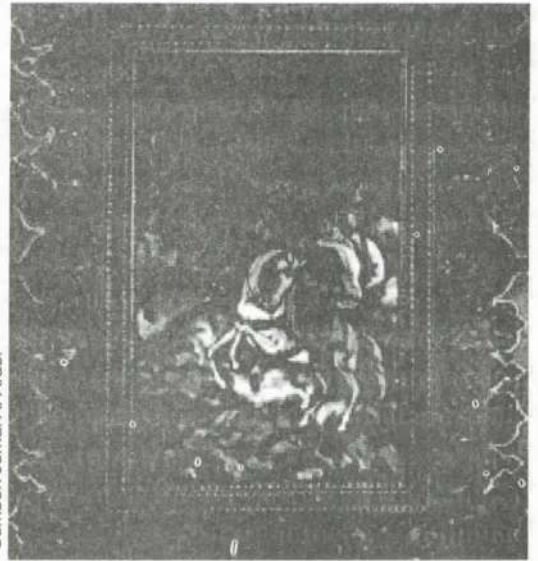
Dalam konteks itulah ilmu *laduniyah* (ilmu laduni) bisa dipahami sebagai bagian dari filsafat *isyraqiyah* atau filsafat iluminasi (pancaran) yang telah menjadi bagian integral dari filsafat umum. Di situ ilmu bukan apa yang dipelajari dari suatu kitab atau disiplin keilmuan tertentu, melainkan pencerahan atau hidayah yang datang dari Allah, sehingga makna mengejawantah dalam bentuk kebenaran yang hadir dan menampakkan diri. Dengan metode keilmuan itu, maka dunia pesantren dan dunia NU mengenal realitas kewalian, yakni orang-orang tertentu yang mendapat limpahan karunia keilmuan dari Allah, memperoleh *futuh* (terbuka tabir keilmuan) serta hidayah, agar mampu memperoleh *hikmah muta'aliyah* (pengetahuan tertinggi) sehingga mampu melihat kebenaran yang hadir dan mengejawantah. Kepercayaan terhadap ilmu *ladunni*, terhadap wali, dan ilmu ketabiban, dan ilmu kanuragan merupakan tradisi pesantren yang tak bisa dipisahkan dalam filsafat pemikiran NU.

⁴ KH Ahmad Shiddiq, telah membahas secara terinci mengenai pandangan keilmuan Ahlussunnah Wal jamaah, dalam *Pemikiran KH Ahmad Shiddiq*, (Surabaya: Yayasan Aula, 1991), h. 20.

⁵ Seperti dikisahkan oleh Imam Syafi'i yang mengadu pada gurunya karena sulit menangkap mata pelajaran, maka Syaikh Waqi menasehati agar meninggalkan maksiat.

Metode ini banyak diceritakan dalam bentuk hikayat, pitutur, dan bahkan mitos, seperti bagaimana Imam Syafi'i berpuasa ketika masih dalam penyusuan, lalu hafal Quran ketika masih bocah; Imam Ghazali menulis kitab tengah malam dengan diterangi jemari tangannya yang bersinar; atau Ibn Hajar seorang yang sangat bodoh yang karena ketekunan olah rohaninya kemudian menjadi ulama besar yang sangat alim. Juga diceritakan bagaimana Ibn Malik baru bisa mengarang nadzam *Alfiyah* setelah mendapat ijazah (restu-pangestu) dari gurunya. Penuturan semacam itu banyak didapati dalam pengantar sebuah kitab atau menjadi selipan dalam sebuah pembahasan masalah. Metode dalam memperoleh pengetahuan semacam itu secara sistematis disusun oleh Az-Zarnuji dalam kitab *Ta'limul Muta'alim*, yang merupakan metode belajar di dunia pesantren NU. Kajian epistemologi pemikiran pesantren serta *manhaj*-nya tidak bisa melepaskan dari kitab standar yang satu ini. Kitab yang tidak hanya memperkenalkan metode berpikir dan didaktik-metodik, melainkan lebih banyak pada pengenalan etika akademik.

Kajian keilmuan di dunia pesantren yang kemudian menjadi *manhaj* pemikiran NU, tidak semata bersifat intelektualistik, melainkan lebih berwatak moral dan spiritual. Karena itu, watak keulamaan seseorang bukan semata ditentukan kemampuan akademiknya, melainkan lebih pada kematangan spiritualnya serta lebih penting lagi adalah integritas moralnya. Maka, di sini sikap pengabdian yang tak



Sumber: Jurnal Al-Arabi

kenal lelah dan amal yang tanpa pamrih serta berani menanggung risiko, merupakan watak keulamaan yang sangat menonjol. Hampir semua ulama NU terdahulu lahir dari sistem pendidikan semacam itu yang menggunakan manhaj pemikiran keislaman pesantren, sebagaimana yang dikembangkan dalam tradisi Islam klasik yang termaktub dalam kitab kuning, serta dalam serat-serat yang dikarang oleh para wali dan ulama setempat. Karena hanya dalam ranah keilmuan seperti itu tradisi pesantren dapat dikembangkan dan hanya dalam semacam itu ulama yang memiliki kealiman serta integritas moral bisa dilahirkan.

Salah satu ciri lain dari keilmuan pesantren adalah mengenal adanya otoritas. Tentu saja otoritas tertinggi adalah Allah yang dikenal melalui wahyu dalam bentuk kitab suci Al-Qur'an. Kemudian Nabi dengan segenap sunnahnya, lalu sahabat, tabi'in dan seterusnya hingga para ulama atau guru yang ber-

fungsi sebagai *mursyid* (pemberi petunjuk) kepada *murid* (pencari petunjuk). Dengan demikian, kajian keilmuan selain mengandalkan pada *matan* (materi) keilmuan, kesinambungan mata rantai otoritas (*sanad*) juga sangat diperlukan, agar sebuah petunjuk atau makna sebuah teks bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, serta dapat diketahui perkembangan makna teks atau doktrin dari zaman ke zaman. Setiap perubahan dan pembaruan yang dilakukan mestilah bertolak dan berakar pada silsilah dan otoritas itu. Ini merupakan tata tertib dan prosedur baku dalam perkembangan tradisi keilmuan pesantren dan NU pada umumnya.

Dalam konteks inilah NU disebut tradisional, dalam artian memiliki akar tradisi dalam berpikir, dan telah mampu membentuk tradisi pemikiran yang standar dan prosedur pemikiran yang historis dan sistematis. Hanya dengan metode dan tradisi itu, seseorang bisa memiliki dan memperoleh otoritas keilmuan, dan hanya mereka yang memiliki otoritas, dalam arti menguasai disiplin keilmuan dan mengetahui prosedur pengembangannya, yang bisa melakukan ijtihad atau tajdid. Sesuai dengan otoritas yang dimilikinya, maka status ijtihad juga tidak sama. Ada yang disebut dengan *mujtahid muthlaq* ('mujtahid besar') seperti Imam Syafi'i (fiqih), Imam Asy'ari (tauhid), Imam Ghazali (tasawuf) dan ada

yang hanya *mujtahid muntashib* (mujtahid terbatas),⁶ yakni para ulama penerus pemikiran madzhab yang ada.

Pada dasarnya, tajdid atau ijtihad terus berkembang di kalangan NU dan pesantren, sesuai dengan dinamika keilmuan itu sendiri dan juga sesuai dengan dinamika masyarakat, karena itu prosedur ijtihad dibicarakan dalam sistem keilmuan pesantren sebagai dasar pemberian ajang bagi pengembangan pemikiran. Pengembangan pemikiran dijalankan tidak secara sembarangan, tetapi dijalankan sesuai dengan prosedur akademik yang sangat ketat sebagaimana yang berlaku dalam tradisi keilmuan pesantren. Betapapun terbatasnya langkah yang dilakukan, tetapi telah merespons berbagai problem yang muncul, baik berupa persoalan keagamaan maupun sosial bahkan politik. Semuanya dijalankan dalam spektrum agama, karena itu ijtihad dilakukan baik dalam forum bahtsul masail di pesantren maupun dalam muktamar-muktamar NU. Bahtsul masail merupakan pusat pengembangan akademik dalam dunia pesantren⁷.

Untuk mendukung landasan semacam itu, maka di pesantren diajarkan ilmu *manthiq* (logika) sebagai dasar pemikiran rasional. Demikian juga pengajaran *qaidah ushuliyah* dan *qaidah fiqhiyah* yang merupakan metode berpikir rasional, yang bersifat *burhani*. Namun demikian, bagi dunia pesantren dan NU, metode pengem-

⁶ Dalam konteks NU hal ini dibahas cukup detail oleh KH Muchith Muzadi, *Apa dan Bagaimana Nahdlatul Ulama*, (Jember: PCNU Jember, 2003), h. 47 dan seterusnya.

⁷ Tentang peran penting bahtsul masail sebagai pusat penembangan intelektualitas di pesantren ini telah ditulis Abdul Mun'im DZ, *Jurnal Gerbang*, 12-V-2002, ELSAD, Surabaya,

bangun keilmuan dan pemikirannya, tidak hanya mengenal metode rasional, tetapi juga mengembangkan metode spiritual iluminatif (*irfani*). Hanya kalangan yang mengamalkan ajaran tasawuf yang bisa mengembangkan dengan sempurna metode *irfani* itu. Karena kurangnya pengetahuan filsafat, maka tradisi tersebut dianggap tidak ilmiah dan tidak rasional, lalu dianggap mistik bahkan tahayul.

Pada tahap berikutnya, persoalan ini tidak hanya dilupakan, tetapi tradisi keilmuan itu telah lama merisaukan kolonial, hanya karena berbeda dengan metode yang dikembangkan oleh kalangan kolonial. Akibatnya, tradisi pemikiran yang khas itu menjadi target pembongkaran, baik yang dilakukan pendeta Belanda seperti Gericke (1829), Snouck Horgronye (1900) maupun Van

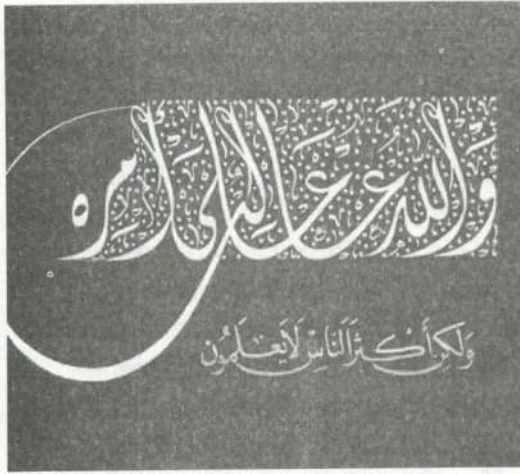
der Plaas (1926). Keberadaan sistem itu dianggap *kanzun la yafna* (sumber inspirasi yang tak ada habisnya), yang mampu menyaingi paradigma pemikiran kolonial. Saat ini, para ilmuwan Indonesia, bahkan para penggerak modernisasi di NU selama ini berusaha keras mendekonstruksi tradisi pemikiran NU dan pesantren yang religius itu lantas menggantinya dengan paradigma modernisasi yang profan dan sekular, yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman teknokrasi.

Sosiologi Pemikiran

Mengenai situasi sosial politik yang melatarbelakangi terbentuknya keilmuan Islam klasik di Timur Tengah, baik itu ilmu tauhid, ilmu fiqih, maupun tasawuf, kalangan ilmuwan Islam sudah cukup mafhum. Karena pemikiran itu selalu dijadikan *hujjah* (argumen) dan rujukan dalam menyusun sebuah *hujjah* ilmiah. Tetapi justeru sejarah pembentukan keilmuan pesantren dan NU di tengah kebudayaan Nusantara itu yang belum banyak diperhatikan. Padahal prosesnya cukup dinamis, memakan waktu cukup lama dan sekaligus membentuk jaringan yang sangat jelimet dan demikian luas. Pergumulan yang intensif antara paradigma Islam dan tradisi Hinduisme, Budhisme serta Jawanisme di Nusantara pada umumnya telah mendorong terjadinya proses pribumisasi pemikiran Islam. Proses itu yang membedakan tradisi pemikiran Islam di Indonesia dengan pemikiran dan tradisi Islam di dunia Arab pada umumnya.

Islam datang ke Nusantara di tengah





dominasi politik Hindu-Budha yang sangat kuat di bawah naungan imperium Singosari dan Majapahit. Bahkan, dominasi budaya dua agama besar itu jauh lebih kuat dari dominasi politiknya, sehingga menjadi kekuatan hegemonik. Kebudayaan Hindu-Budha telah merasuk dan meragasukma dalam kesadaran masyarakat Nusantara.⁸ Pemikiran Islam klasik dibangun di tengah hegemoni budaya pra-Islam yang beraneka ragam itu, sehingga memberikan corak yang sangat khas Nusantara. Di tengah tantangan semacam itu, di dalam Islam terjadi ijtihad dan jihad yang tiada henti, untuk membentuk tradisi Islam yang kukuh dan bisa diterima masyarakat.

Ijtihad berkaitan dengan agama dan

budaya gigih dilakukan Sunan Giri sejak zaman majapahit, yang kemudian mencapai puncaknya pada zaman Demak, karena di situ harus menciptakan sistem politik dan kenegaraan berdasarkan Islam. Berbagai ijtihad dilakukan agar sistem yang dibangun sesuai dan tidak melanggar ajaran Islam dan sekaligus relevan dengan kebudayaan yang ada juga bisa diapresiasi secara Islam. Proses itu dianggap sangat penting dan mendesak, sehingga terus dilanjutkan oleh Raja Trenggana hingga Sultan Hadiwijaya. Untuk mempertahankan prinsip tauhid, maka kepercayaan Trimurti yang berkembang di masyarakat yang disebarkan melalui pertunjukan wayang didekonstruksi, dewa diubah statusnya dari tuhan menjadi sekadar makhluk unggulan. Demikian juga untuk mempertahankan ajaran Islam tentang larangan menggambarkan makhluk hidup, maka bentuk manusia dalam wayang dideformasi, sehingga hilang sosok kemanusiaan, hingga tinggal benar-benar wayang (bayangan). Dengan cara itu wayang semakin menemukan jatidiri kewayangannya, karena itu semakin adiluhung. Ajaran Islam diijtihadi menjadi suatu sarana kreatif, bukan membelenggu. Pada masa Sultan Agung di Mataram,⁹ memiliki karya yang khas memadukan

⁸ Dengan demikian tidak benar pandangan Nurcholish Madjid bahwa agama Hindu dan Budha hanya berpengaruh pada elite politik, tetapi tidak mempengaruhi masyarakat luas. Seandainya demikian tentu para wali tidak perlu bersusah payah menciptakan wayang dan merebut plot Mahabarata. Perombakan seni pertunjukan rakyat itu dilakukan untuk mengubah kepercayaan lama yang sudah mengakar dalam kesadaran masyarakat.

⁹ RM Mangkudimedja dan GAJ Hazeu, *Kaweruh Asalipun Ringgit Sarta Agami Ing Jaman Kina*, (Jakarta: P&K, 1980).

antara kalender Saka dengan kalender Hijriyah. Pada zaman Kesultanan Surakarta-Yogyakarta, proses itu diteruskan oleh para raja, ulama dan pujangga yang menghasilkan berbagai kitab babon, baik bidang agama maupun sastra.

Pada zaman Diponegoro, sekitar tahun 1800-an, Pesantren Tegalrejo Magelang, Pesantren Kedu, serta Pesantren Tegalsari Ponorogo yang merupakan lembaga pendidikan bagi para raja, ulama dan pujangga, tidak hanya mengajarkan kitab kuning, seperti Ihya 'Ulumiddin (tasawuf), Tuhfah (fiqih), Nashihatul Muluk (etika politik) juga mengajarkan kitab Jawa kuno seperti *Babad Majapahit*, *Kakawin Arjunawijaya*, dan *Serat Dewa Ruci*.¹⁰ Bahkan *Serat Dewaruci* yang ditulis oleh pujangga Majapahit itu menjadi kajian filsafat tasawuf di beberapa pesantren Jawa, seperti Pesantren Cabolek Kiai Mutamakim.¹¹ Hal serupa juga terjadi di Luar Jawa. *Serat Jatiswara* yang berbahasa Jawa itu juga menjadi kajian di beberapa pesantren di Lombok.¹²

Walaupun intensitas hubungan para wali dan ulama Nusantara dengan pusat Islam di tanah Arab sangat intensif,—baik yang dilakukan melalui proses *rihlah ilmiah* (pengembaraan keilmuan) yang dilakukan oleh para santri dan ulama kelana maupun melalui pelaksanaan

ibadah haji—namun proses itu tidak menghalangi para ulama Nusantara untuk melakukan pribumisasi atau adaptasi ajaran Islam dengan tradisi Hindu-Budha dan berbagai tradisi lokal yang ada. Para ulama dan rohaniawan agung pada periode ini, mulai para wali hingga thabaqat berikutnya, di samping menguasai khazanah keilmuan Islam juga menguasai sastra Hindu-Budha dan bahasa Kawi. Dengan demikian mereka bisa menempatkan ajaran Islam di tengah ajaran lama itu dengan pas dan proporsional. Ketepatan penempatan Islam itu membuat kehadiran Islam relatif tidak menimbulkan gejolak dan penolakan, karena dirasakan tidak mengganggu keberadaan mereka. Tradisi setempat tidak dimusnahkan tetapi dikembangkan sebagai *wasail* (sarana) pengembangan Islam. Karena itu, kehadiran Islam mendapat simpati besar dari para penganut kepercayaan lama. Hal itu bisa dimengerti karena kebudayaan Hindu-Budha yang sudah mengalami kemunduran itu kemudian didinamisir dengan spirit baru Islam sehingga kebudayaan Nusantara bangkit kembali.

Hal itu tidak hanya terjadi di Jawa. Di kerajaan Aceh Darussalam ada ulama besar, Syekh Abdurrauf Sinkil. Beliau seorang ahli agama dan pujangga yang

¹⁰ Lihat Otobiografi Diponegoro, *Babad Diponegoro*, yang ditulis selama masa pembuangan di Makasar, baca juga Muh. Yamin, *Pangeran Diponegoro*, (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1950).

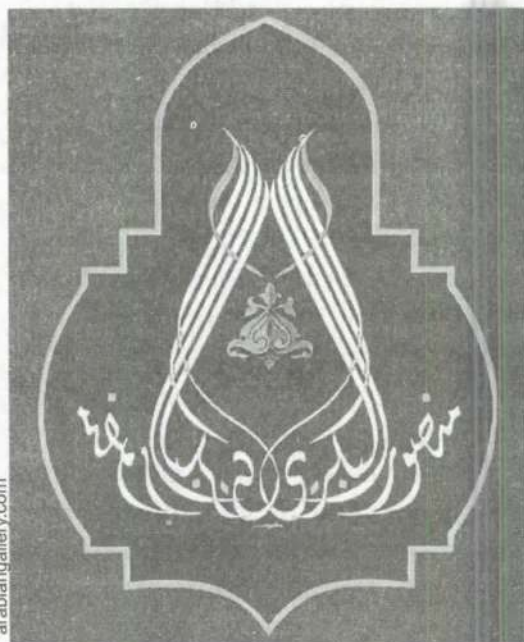
¹¹ Anonymous, *Serat Cabolek*, (Jakarta: Dep P&K, 1981).

¹² Karel Steenbrink, "Perkembangan Sastra Pesantren", dalam *Jurnal Pesantren*, (Jakarta: P3M, 1990).

ahli dalam kebudayaan lokal. Karena itu, ia bisa melakukan pribumisasi ajaran Islam di Kerajaan Aceh Zaman Raja Dharmawangsa (Sultan Iskandar Muda) 1607-1636. Tradisi itu kemudian dilanjutkan oleh muridnya Syekh Burhanuddin Ulakan,¹³ sebagai penganjur penting agama Islam di Sumatera Barat, yang berhasil memadukan antara adat dengan Syara' yang disahkan dalam Piagam Bukit Marapalam (1650). Semuanya itu merupakan proses ijtihad yang dilakukan para ulama Nusantara terdahulu yang sangat tajam dan berani. Di pesantrennya, Syekh itu mengajarkan ilmu keislaman murni seperti tafsir, hadits, fiqh, dan tasawuf. Sementara di luar pesantren ia mengembangkan tradisi lokal yang diisi dengan ruh Islam bersendikan madzhab Syafi'i.¹⁴

Aktivitas yang sama juga dilakukan oleh para ulama Bugis. Mereka menempatkan Islam di tengah kebudayaan lama secara sangat halus, sehingga transformasi kepercayaan lama ke dalam kepercayaan baru terjadi dengan sangat halus tanpa gejolak. Di beberapa naskah disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang asing, tetapi juga masih kerabat orang Bugis. Bahkan Nabi Muhammad sempat bertemu dengan Sawerigading, untuk melakukan dialog intensif. Dari pertemuan itu kemudian mengintegrasikan al-

Qur'an dengan kepercayaan lokal sehingga lahirlah kitab *Galigo Lontara Purikani*¹⁵ Bagi para ulama Bugis lama, ketepatan asal-usul Nabi itu tidak perlu, yang penting kehadiran ajaran agama Nabi Muhammad itu bisa diterima dan diamalkan dalam struktur kebudayaan masyarakat Bugis. Banyak naskah yang dihasilkan pada periode awal ini, yang merupakan bagian dari sejarah perkembangan pemikiran Islam di sana. Hampir semua karya itu dikarang oleh para ulama sufi di pesantren yang ada di kawasan Timur itu. Karena itu, ketika kelompok Darul Islam yang beraliran Wahabi



arabiangallery.com

¹³ Telaah karya Imam Abdul Manaf al-Khatib, *Sejarah Singkat Asuliyaullah Syekh Burhanuddin Ulakan*, sebuah manuskrip Arab Melayu diterbitkan oleh Badan pengelola Makam Syekh Buhanuddin Ulakan Sumatera Barat.

¹⁴ Pandangan itu ditulis oleh seorang tokoh NU Sumatera Barat Buya Bagindo Letter, *Proses Bersenyawana Adat dan Syarak di Mingkabau*, (Padang: Universitas Andalas, 1991), h. 12.

memberontak di daerah ini, karya tersebut dianggap jahiliah dan dibakar. Demikian juga tokoh NU dan pesantren banyak yang ditahan kelompok radikal itu.

Pengetahuan tentang adat dan budaya setempat telah menjadi prasyarat penting bagi para ulama dalam pengembangan pemikiran keislaman di pesantren. Kesemuanya itu dikonsolidasi oleh NU ketika berdiri. Karena itu, kehadiran NU diterima secara luas oleh kalangan Islam Nusantara, karena sebelumnya telah tercipta jaringan keilmuan dan keulamaan di kalangan mereka. Dengan demikian, NU juga dikenal sebagai garda depan dalam mengembangkan tradisi Islam Nusantara, sehingga menjadi rujukan kelompok Islam pesantren yang lain, seperti Perti, Washliyah, Mathlaul Anwar, dan sebagainya.

Perkembangan Pemikiran NU Awal

Keislaman NU dan pesantren selalu mengidentifikasi diri sebagai kelanjutan keislaman Walisongo. Sementara tradisi keislaman yang dirumuskan Walisongo yang merupakan akomodasi dari kebudayaan lokal pra-Hindu, zaman Hindu-Budha juga terus dilestarikan, baik cara berpikir yang dialektis, maupun yang bersifat perilaku seperti tradisi selamatan dan seremoni-seremoni sosial. Kesemuanya telah ditransformasikan dalam *ghayah* (cita-cita) Islam, sementara *wasail* (sara-

nanya) berasal dari kepercayaan lama. Semuanya itu terbukti efektif dalam mengubah kesadaran dan cara berpikir masyarakat serta mendinamisasi terbentuknya masyarakat baru.

Memang pemahaman keislaman para ulama saat itu juga tidak bersifat tunggal. Pengembangan rumusan fiqih kebudayaan atau politik kebudayaan, misalnya ada juga yang menentang penggunaan sarana setempat untuk pengembangan Islam. Demikian sikapnya terhadap kesenian juga bermacam-macam, karena itu KH. Hasyim Asyari pernah mengeluh terhadap sikap beberapa ulama yang masih mengharamkan penggunaan alat musik baik tradisional maupun modern. Dalam forum Mukhtamar NU, ia berjuang keras untuk membela pendiriannya bahwa penggunaan sarana musik untuk pengembangan Islam itu sangat penting sebagai strategi pengembangan Islam. Setelah mengutarakan hujjahnya yang berdasarkan hukum fiqih dan berdasarkan tradisi serta kemaslahatan sosial dengan sangat meyakinkan, akhirnya mampu mengalahkan hujjah para ulama yang menentangnya. Akhirnya pendapat Kiai Hasyim Asy'ari itu diterima oleh muktamirin.¹⁶

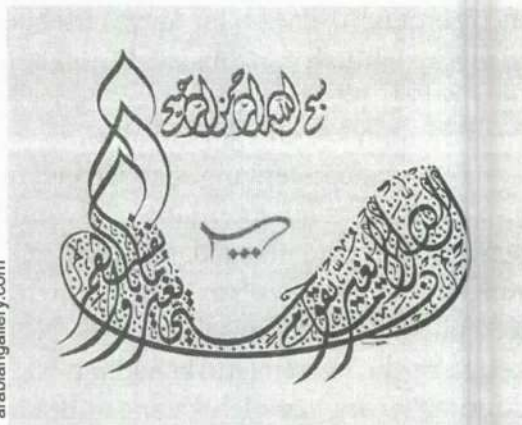
Tetapi, di sisi lain, ia tetap mengharamkan pemakaian celana dan dasi, yang dianggapnya sebagai imitasi terhadap kebudayaan Belanda. Kenyataan ini didasarkan bahwa pada saat itu para

¹⁵ Lihat Muchlis Paeni, "Peranan Naskah dalam Kontak Sosial Budaya Bugis", makalah Seminar Tradisi Lisan, Jakarta 2004

¹⁶ Lihat Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang dari Pesantren*, (Bandung: Al-Maarif, 1974), h. 94. Lihat juga KH. Aziz Masyhuri, *Hasil Keputusan Mukhtamar dan Munas Nahdlatul Ulama*, 1977.

ulama sedang gigih melawan pengaruh penjajah. Dalam perkembangannya, pengharaman itu dicabut ketika suasana penjajahan mulai surut. Jadi, hal itu lebih merupakan sebuah strategi kebudayaan untuk melawan hegemoni kolonial. Di sisi lain juga mulai memperkenalkan sistem sekolah, yang merupakan metode pendidikan baru, yang dipelopori oleh KH Wahid Hasyim Tebuireng yang ditiru oleh pesantren yang lain. Mulai saat itu, *schooling system* (sistem madrasa) yang diadaptasi dari tradisi kolonial itu mulai diterapkan di pesantren, untuk melengkapi sistem *sorogan* dan *bandongan* yang khas pesantren. Rintisan itu segera diikuti pesantren yang lain, sehingga tradisi santri kelana pelan tapi pasti menghilang dari tradisi pesantren. Santri dipaku dalam kelas, sehingga kebiasaan belajar berpindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya tidak dimungkinkan. Santri harus belajar hingga tamat di satu pesantren saja.

Sikap NU terhadap kebudayaan lokal juga menunjukkan adanya apresiasi yang tinggi. Terhadap perwalian nikah di Sumatera Barat yang tidak dilakukan orang tua sendiri, tetapi oleh ninik-mamak, sesuai dengan tradisi Minangkabau, maka pada awal 1950-an ulama NU memutuskan bahwa *tauliyah* (perwalian) tersebut absah sesuai dengan hukum Islam dengan jenis wali hakim yang ditunjuk oleh



negara. Dengan demikian tradisi yang sedang digugat oleh kelompok Wahabi itu diselamatkan oleh NU,¹⁷ padahal tradisi *tauliyah* itu sebenarnya telah mendapatkan pengesahan dari ulama Perti alangan Islam bermadzhab Syafi'i yang berkembang di sana.

Dengan demikian menunjukkan bahwa sejak awal NU telah memikirkan soal politik kebudayaan, yakni ke mana kebudayaan itu hendak diarahkan. Karena itu, pemikiran Islam dikembangkan untuk merespons berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Dalam semua proses tersebut tampak bahwa bahasa dan metode yang digunakan tidak hanya Quran dan Sunnah, tetapi juga tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Pertimbangan pada *urf* (adat) dan *mashlahah* kelihatan sangat menonjol pada masa itu. Upaya pesantren menem-

¹⁷ Lihat, KH Wahab Hasbullah, "Penjelasan tentang Waliul Amri", dalam *Majalah Gema Muslimin*, 1954, ini merupakan penjelasan Kiai Wahab, Rais Aam PBNU, tentang keputusan para ulama Indonesia yang dipelopori NU yang menetapkan Presiden Soekarno sebagai Waliul Amri, yang berhak menunjuk wali hakim dalam sistem perkawinan Islam.

patkan Islam sebagai bagian integral dari budaya nusantara dilakukan berdasarkan prinsip teologi yang diyakini. Karena itu, strategi kebudayaan tersebut telah mendapat keabsahan teologis, sehingga diyakini sejalan dengan akidah Islam. Walaupun tradisi itu dituduh sebagai khurafat dan sinkretis atau musyrik oleh kelompok Islam yang lain, termasuk oleh para ilmuwan Barat, kalangan NU dan pesantren mempercayainya sebagai tradisi Islam yang sudah dimodifikasi dan dipribumisasi.

Pemikiran NU Kontemporer

Setelah kembali ke khittah 1926 yang dilakukan pada tahun 1984, kegiatan pemikiran NU berjalan sangat gencar. Hal itu memang didorong oleh tujuan praktis, yakni kembali mengembangkan dunia pesantren dan upaya meningkatkan kiprah NU dalam membangun umat. Dengan asumsi bahwa untuk menggapai persoalan kontemporer tersebut pemikiran yang ada kurang memadai, maka perlu terus dikembangkan. Gerakan itu diinspirasi oleh kepemimpinan baru NU di bawah KH. Ahmad Shiddiq dan KH. Abdurrahman Wahid, yang merupakan pemikir yang cemerlang. Dari situ perkembangan pemikiran Islam menjadi kembali dinamis.

Realisasi dari dinamika tersebut adalah dengan dibukanya *Forum Mubahatsah Kitab*, yang dilakukan oleh ka-

langan ulama NU di gedung PBNU yang dirintis 1985, yang dikordinasi oleh Masdar F Mas'udi. Berbagai kitab ditelaah dengan kritis. Mubahatsah (kajian) itu dengan tegas bertujuan; (1) untuk mendorong pertumbuhan pemikiran di lingkungan NU, (2) memberikan konteks yang lebih empirik terhadap konsep keagamaan yang ada dalam kitab kuning, dan (3) mengembangkan pemikiran yang lebih kritis dan fungsional.¹⁸ Dari situlah seluruh pergerakan pemikiran NU kontemporer itu dimulai dan dikembangkan.

Walaupun forum mubahatsah itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa kitab yang sempat dibahas, antara lain *Kitab Ar-Risalah* (metode pemikiran imam Syafi'i), *Ahkamus Sulthaniyah* (fiqih politik, Imam Mawardi) dan *Ta'limul Muta'allim* (metode pendidikan karya Az-Zarnuji) serta *Al-Ibanah* (pemikiran teologi Asy'ari), namun kajian itu mempunyai pengaruh yang sangat mendasar pada pemikiran NU di kemudian hari. Kajian tersebut dianggap mennggaggu keamanan pemikiran lama, maka kalangan ulama konservatif melarang kajian tersebut, hingga akhirnya dihentikan. Sebenarnya peristiwa itu tidak perlu terjadi seandainya penyelenggara mampu mengelola forum, sehingga tidak cenderung anarkis. Gagasan untuk membakar kitab *Ta'lim* yang dilontarkan secara sarkas oleh seorang peserta, yang tidak mengerti,

¹⁸ Lihat, *Kerangka Acuan Forum Mubahatsah (Kajian) Kitab PBNU*, Jakarta, 1986.

telah memancing kemarahan para kiai, yang mengerti tentang fungsi Kitab itu¹⁹. Sangat disayangkan ditutupnya mubahasah tersebut padahal kalangan NU sangat membutuhkan forum semacam itu untuk memperdalam penguasaan mereka terhadap kitab kuning. Tetapi kelihatan sejarah sedang mengarah pada arus kecil itu, akhirnya menjadi gelombang yang terus membesar yang menyebar di mana-mana, dalam bentuk berbagai bahtsul masail dan halqah yang dikembangkan dalam berbagai forum NU dan pesantren.

Perubahan terjadi, ketika terjadi revolusi cara bermadzhab, kalau selama ini kalangan NU puas hanya bermadzhab secara *qauly* yakni menggunakan produk pemikiran para imam madzhab yang ada, atau kalau tidak hanya secara *ilhaqi* yakni menganalogikan pendapat para imam. Tetapi karena kebutuhan dan tantangan saat ini lebih besar, yang tidak semuanya diantisipasi oleh para imam madzhab, maka mulai diusahakan bermadzhab secara lebih longgar dan lebih dinamis dengan bermadzhab secara *manhaji* yakni mengikuti metode berpikir para imam bukan pendapatnya. Ini dianggap bentuk bermadzhab yang lebih kreatif. Dari situ kemudian persoalan *manhaj* menjadi tema sentral dalam kajian Islam di lingkungan NU.

Dalam pencarian *manhaj* itu akhirnya tidak hanya menelaah mantiq maupun ushul fiqih, tetapi juga kemudian menjangkau wilayah filsafat dan ilmu sosial. Dengan langkah itu maka cara berpikir tidak hanya memadukan antara pemikiran yang bersifat *naqli* (doktriner) dan *aqli* (rasional), tetapi kemudian dilengkapi dengan pemikiran empiris (*waqi'i*). Dalam bahtsul masail baik yang diselenggarakan dalam pesantren maupun Munas dan Muktamar NU pendekatan empiris sudah banyak diterapkan, dengan menggunakan pendekatan teks, konteks dan sejarah,²⁰ yang hampir menjadi ruh dalam kajian kitab di lingkungan NU selama ini.

Tradisi baru itu semakin menemukan relevansinya ketika NU di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang banyak melibatkan para aktivis sosial itu hendak menjadikan NU sebagai gerakan sosial. Pemikiran empiris diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan sosial yang dikembangkan. Bersamaan dengan berkembangnya tradisi pemikiran empiris itu, tradisi pemikiran kritis turut berkembang di lingkungan NU. Penolakan beberapa tradisi lama yang dianggap tidak sesuai dengan rasionalitas baru, juga dilakukan. Walaupun kalangan pesantren semula banyak yang menolak, tetapi berkat pengaruh, kharisma dan pesona

¹⁹ Lihat surat teguran KH. Rodli Shaleh, Wakil Rais Aam PBNU, tgl 31 Januari 1987, yang mengecam cara melakukan mubahatsah yang dianggap tidak menghormati etika akademik pesantren.

²⁰ Pengalaman oleh Karl Popper juga dianggap sebagai salah satu metode karena bersifat empiris. Lihat Karl R Poper, *The Logic of Scientific Discovery*, (London: Huchtinson & Co Ltd., 1959), h. 39

Abdurrahman Wahid, akhirnya banyak pesantren mengembangkan metode pemikiran kritis itu, dan santri akhirnya mulai berpikir kritis, termasuk kritis pada tradisi sendiri.²¹ Dengan paradigma modernisasi, kajian tentang pesantren dan NU yang ditulis kalangan sarjana NU sendiri mempunyai kecenderungan seperti kajian yang dilakukan sarjana asing, penuh dengan distorsi dalam melihat NU²² karena menggunakan paradigma yang tidak tepat, maka di sini mulai dirumuskan metode baru yang bisa melihat perkembangan NU secara lebih utuh dan komprehensif.²³

Persoalan pengembangan pemikiran itu menemukan momentumnya bersamaan dengan berdirinya Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dengan *Jurnal Pesantren-nya*. Semua ide yang tidak sempat dikembangkan di Mubahatsah Kitab Kuning-nya PBNU, dikembangkan di P3M ini. Apalagi setelah dikembangkan berbagai halaqah di berbagai pesantren, maka tema mengenai *manhaj* dan pengembangan serta penerapan *manhaj* baru itu semakin intensif dilakukan, berbagai eksperimen-pemikiran dikembangkan dengan

relatif sedikit tantangan, bahkan semakin memperoleh banyak dukungan. Pengembangan pemikiran yang kritis, kontekstual-sosiologis dan historis mendapatkan lahan subur dalam forum itu. Buah yang paling nyata dari forum semacam itu adalah terbitnya buku *Risalah Agama Keadilan* karya Masdar F Mas'udi.²⁴ Buku ini menginspirasi banyak kalangan, tetapi sekaligus mendapat kecaman dari berbagai kiai pesantren yang sejak awal menentang gerakan pembaruan di NU.

Tradisi pemikiran teknis dan kritis itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap gerakan sosial NU, sehingga NU menjadi kekuatan sosial yang paling dominan alam masyarakat Indonesia akhir Orde Baru. Dengan kekuatan dan gerakan sosial dinamis itu, NU memiliki pengaruh politik yang sangat signifikan, sehingga mampu menjadi kekuatan dominan yang bisa mengimbangi kekuasaan Orde Baru. Beberapa pesantren penting yang selama ini hanya menjadi pusat pendidikan agama, bertambah menjadi kekuatan sosial yang berpengaruh, dari sana juga muncul beberapa kiai yang berpengaruh pula dalam percaturan sosial dan politik nasional.

²¹ Pemikiran tentang hegemoni Gramsci dan teori kritis madzhab Frankfurt, menjadi rujukan penting komunitas ini.

²² Kritik terhadap kecendrungan ini telah dilakukan KH Muchith Muzadi, ini bukan karena kemalasan mereka dalam menggali sumber data, melainkan karena paradigma keilmuan yang diperoleh di universitas tidak tepat.

²³ Beberapa alternative teori dan metodologi ditawarkan oleh Abdul Mun'im DZ dan Adnan Anwar, *Pengantar Historiografi NU*, (Jakarta: PPLTN-NU, 2001), h. 42-45.

²⁴ Masdar F Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991).

Masuknya pengaruh para aktivis sosial pada kiai dan santri itu tanpa disadari telah membawa dampak besar bagi eksistensi tradisi pemikiran pesantren, apalagi setelah beberapa tradisi pesantren sebagaimana tertuang dalam metode pendidikan pesantren ditolak, kemapanan pemikiran diusik, seraya mengidealkan cara berpikir empirik dan kritis dari Barat yang diperkenalkan para aktivis sosial yang datang ke sana. Maka, di sini terjadi deviasi, ketika hendak kembali ke khittah NU dengan kembali ke pesantren dan kembali menjadi pelayan sosial, tetapi kemudian yang berkembang cara berpikir empiris-positivis dan teknokratis Barat, yang masuk melalui berbagai training kepemimpinan dan keterampilan. Munculnya para aktivis dan teknokrat sosial NU seperti Dr. Fahmi D Saifuddin, Abdullah Syarwani, MM Billah dan sebagainya, semakin memperkuat kecenderungan itu. Sementara itu, penggalian terhadap paradigma pemikiran yang sesuai dengan kosmologi NU dan pesantren semakin terabaikan.

Pergeseran Ideologi

Walaupun pengembangan pemikiran itu dinilai memberikan kontribusi yang sangat positif bagi perkembangan NU selama masa Orde Baru. Tetapi perkembangan itu juga mengakibatkan pe-

rubahan besar secara budaya dan ideologi. Pergeseran dari pemikiran doktriner dan mistis ke pemikiran rasional bahkan empirik, sesuai dengan tradisi perkembangan pemikiran yang ada di Barat terjadi sangat meluas. Hanya kelemahannya diserap tanpa seleksi, tanpa modifikasi. Demikian juga dari segi tujuan, kalau dulu pengembangan pendidikan untuk membentuk karakter keislaman dan kebangsaan, maka pengembangan para pemuda diarahkan pada tumbuhnya *technical skill* (pelatihan ketrampilan) yang mampu melakukan pekerjaan sosial secara terencana dan terkontrol.²⁵ Sejak awal Abdurahman Wahid telah memperingatkan resiko yang harus dihadapi NU dan pesantren ketika menggunakan metode itu akan mengurangi intensitas pesantren sebagai pusat pengkaderan ulama.²⁶ Tetapi agenda itu terpaksa dilakukan untuk mengatasi problem sosial, berupa kemiskinan yang sangat mendesak.

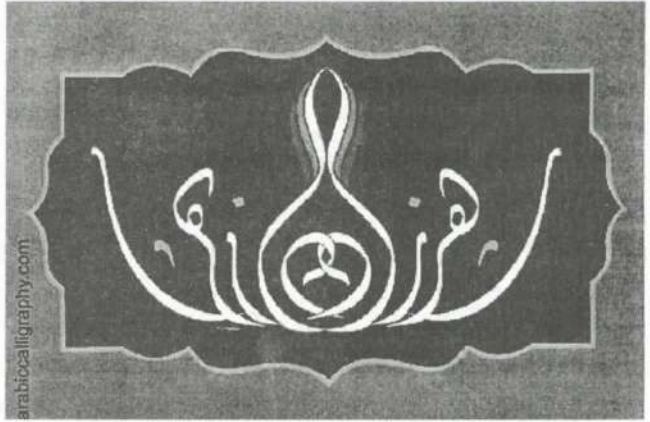
Langkah itu tanpa disadari telah mengakibatkan perubahan sangat mendasar, kalau selama ini pendidikan dilakukan sebagai langkah untuk penanaman nilai keagamaan, serta membentuk karakter kebangsaan. Saat ini pendidikan diganti dengan istilah *training* atau pelatihan yang dilakukan untuk menyediakan tenaga ahli yang sesuai dengan

²⁵ Gagasan pemberian keterampilan di Pesantren pertama kali diperkenalkan oleh seorang teknokrat sosial Orde Baru, Menteri Agama Mukti Ali. Tetapi gagasan itu gagal karena tidak dipersiapkan dukungan sosialnya. Namun gagasan itu cukup berhasil ketika dilakukan oleh kalangan aktivis NU sendiri.

²⁶ Abdurrahman Wahid, "Paradigma Pengembangan Masyarakat Melalui Peantren", dalam *Jurnal Pesantren*, P3M, Jakarta, 1988.

kebutuhan reformasi sosial. Pelatihan berbagai aktivitas dilakukan, sejak latihan budi daya ikan dan ternak ayam, koperasi, hingga penerapan teknologi tepat guna. Pada tahap berikutnya dikembangkan pelatihan yang agak abstrak seperti pelatihan pengembangan demokrasi, *civil society* dan advokasi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal itu dirasa sebagai kebutuhan pokok untuk menghadapi rezim Orde Baru yang otoriter. Perubahan paradigma itu juga disertai dengan seperangkat perubahan terma. Kalau selama ini peningkatan kemampuan anggota organisasi disebut kaderisasi, maka sekarang disebut sebagai training. Metodenya juga diganti, saat ini cara doktrin ditiadakan, model partisipatoris diterapkan, karena yang diperlukan keterampilan dalam bekerja, bukan militansi dalam membela ideologi.

Dengan sendirinya, dalam komunitas itu kader tidak dibutuhkan, karena organisasi diasumsikan hanya membutuhkan seorang *ambtenaren*, karyawan, tenaga kerja. Istilah kader, sebuah istilah yang dianggap ideologis dan dengan sendirinya politis dilenyapkan, diganti dengan istilah sumber daya manusia (SDM), yang merupakan terminologi khas dalam sistem teknokrasi.²⁷ Buku kaderi-



sasi telah diganti dengan buku pengembangan sumber daya manusia. Konsep ini sangat berbeda muatan substansi dan latar belakang ideologinya. Dengan sendirinya istilah kader tiba-tiba lenyap sementara istilah sumber daya manusia menjadi sangat populer.

Gerakan kaderisasi berhenti, sementara gerakan pelatihan sangat gencar dilaksanakan, dengan sumber dana asing yang sangat melimpah. Dari sini kalangan NU mulai mengenal dan menggunakan dana asing, seraya mengabaikan pengumpulan dana masyarakat yang selama ini menjadi landasan kemandirian mereka. Akibatnya keswadayaan yang diharapkan justru membuah ketergantungan yang menjerat. Tidak bisa dibayangkan bagaimana sebuah organisasi tanpa sistem kaderisasi, akibatnya sistem nilai, tradisi tidak bisa ditransmisikan dari generasi ke generasi. Di situlah titik pisah

²⁷ Peristiwa ini ditandai dengan terbitnya buku, *Konsep Pengembangan Sumberdaya Manusia di Lingkungan NU*, (Jakarta: PBNU, 1994).

kalangan NU muda dengan tradisi di masa lalu baik falsafah maupun manhajnya.

Kalau pada mulanya tema pemikiran NU di sekitar masalah kenegaraan dan kebangsaan serta kerakyatan dalam pespektif agama, ini berkaitan dengan penetapan NU bahwa Pancasila dan UUD 45 serta NKRI merupakan bentuk final dari bentuk Negara RI. Pemikiran tersebut ditinggalkan, kerana sekali lagi dianggap terlalu ideologis dan politis serta abstrak, lantas diganti dengan agenda yang lebih konkret dan operasional. Gagasan mengenai teologi pembangunan (pembebasan) agenda reaktualisasi Aswaja serta wacana Islam kiri yang merupakan agenda penting saat itu, hilang setelah masuknya agenda *civil society* yang digerakkan oleh lembaga-lembaga internasional. Di alam kesadaran baru itu seorang aktivis organisasi bukan lagi seorang kader yang penuh dedikasi dan perjuangan dengan semangat voluntarisme, melainkan telah diganti oleh seorang pekerja sosial yang terampil dan karena itu harus diberi imbalan secara profesional. Perubahan dari seorang aktivis pejuang menjadi seorang pekerja sosial telah menjadikan watak organisasi dari tempat pengabdian menjadi tempat kerja seperti sebuah perusahaan.

Sebagai organisasi yang belum mampu menopang kebutuhan finansialnya sendiri, tentu sangat berat ketika harus menang-

gung biaya organisasi yang tengah dimoderenkan dan diprofesionalkan itu. Selama ini sumbangan dari pemerintah terbatas, bahkan makin surut, tidak ada sumber lain kecuali dana dari luar negeri yang selama ini hanya digunakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ketergantungan pada dana itu juga akhirnya tidak memiliki kemandirian dalam membuat agenda. Di tengah iklim semacam itu, pada tahun 2002, PBNU pernah berupaya melakukan terobosan dengan merumuskan konsep kaderisasi,²⁸ tetapi rencana itu kandas karena gelombang pragmatisme menerpa sedemikian kencang hingga menyapu spirit kaderisasi yang sempat muncul.

Bagaimanapun harus diakui, bahwa perkembangan pemikiran tersebut telah mengangkat NU dari pemikiran pesantren ke kancah pemikiran nasional. Sebagai kekuatan politik yang signifikan karena memiliki kekuatan ide, terutama yang dilansir oleh Abdurrahman Wahid yang didukung kalangan muda dan para ulama. NU selalu menjadi rujukan bagi pemikiran keislaman dan kemasyarakatan termasuk politik, karena wataknya yang moderat, pluralis itu telah menjadi kekuatan penyeimbang di tengah konflik ideologis yang terjadi di negeri ini pada saat menjelang dan selama berlangsungnya gerakan reformasi. Itulah karir puncak dan sekaligus langkah terakhir

²⁸ Abdul Mun'im DZ dkk., *Pedoman Kaderisasi Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: PP. LAKPESDAM NU, 2004). Sistem kaderisasi tidak pernah dilaksanakan, sehingga buku ini hanya berfungsi sebagai dokumen historis.

NU dalam kepemimpinan ide dan gerakan sosial. Pemikiran dan gerakan sosial itu berhenti bukan hanya karena muncul penolakan dari sementara ulama, tetapi juga karena mengalami disorientasi akibat perubahan situasi.

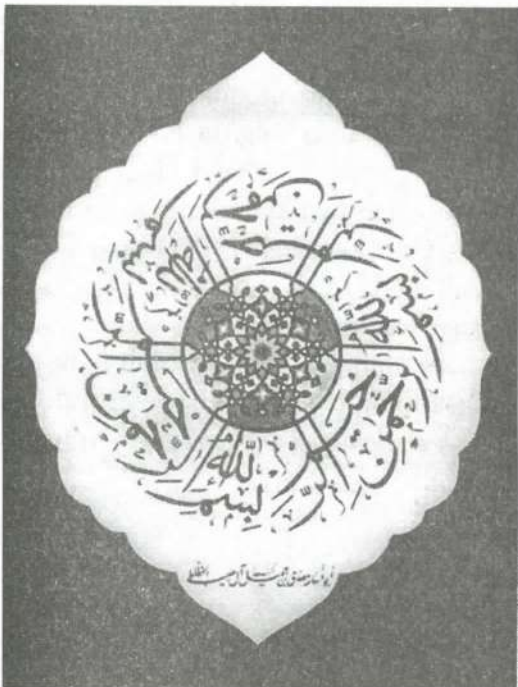
Kebuntuan dan Jalan Keluarnya

Gerakan sosial yang dilakukan sejak tahun 1980-an itu mempunyai cita-cita politik yang jelas. Pendidikan dan penyadaran terhadap rakyat dilakukan untuk menciptakan sistem sosial dan tatanan politik yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian gerakan reformasi merupakan bagian dari gerakan sosial yang berkembang sebelumnya. Seluruh cita-cita sosial dan politik berpuncak pada masa reformasi, pada masa reformasi itu seluruh aspirasi ditumpahkan seluruh agenda diaplikasikan. Justeru di tengah upaya

penerapan agenda itu seluruh mitos terkuak, segala manipulasi terbukti.

Demokrasi yang dulu diharapkan mampu menciptakan kedaulatan rakyat, justeru melenyapkan kedaulatan rakyat, ternyata rakyat hanya punya hak pilih, tetapi tidak diberi hak untuk menentukan nasib sendiri, seluruh keputusan DPR tidak mengabdikan pada rakyat tetapi mengabdikan pada perusahaan multi nasional, demikian presiden dan gubernur bukan presiden rakyat, tetapi lebih merupakan presiden para konglomerat global. *Civil society* yang dulu digerakkan untuk mengimbangi negara otoriter, akhirnya digunakan untuk melemahkan negara sendiri, dan setelah negara lemah bahkan jatuh kedaulatannya tidak diterima rakyat, melainkan diterima oleh kapitalisme global yang merencanakan dan membiayai seluruh agenda itu. Negara dan pemerintah tidak boleh melayani rakyat, tetapi harus melayani kepentingan kapitalis. Gerakan multikulturalisme bukan untuk melindungi keragaman, tetapi untuk melindungi rasialisme kelompok dominan.

Masyarakat termasuk NU memang butuh tatanan sosial dan politik yang baik dan adil, tetapi demokrasi dan hak asasi manusia yang digunakan, baik *falsafah* dan *-manhaj* nya tidak dirancang oleh kalangan NU sendiri, tetapi agenda yang didesakkan pada mereka. Dalam logika dikenal adanya *modus ponens*, barang siapa menciptakan sebab, maka akan menguasai akibat. Demokrasi dan hak asasi manusia yang berkembang selama ini dirancang oleh imperialisme untuk tujuan imperial, karena itu ketika perjuangan demokrasi



arabiangallery.com

tercapai, maka yang menggerakkan demokrasi itulah yang memetik hasilnya. Kelompok pro demokrasi tersingkir ke pinggir jalan sambil gigit jari menyaksikan massa dan negara yang anarkis, sementara para korporat semakin dominan dan represif. Tujuan demokrasi yang dikembangkan korporasi multi nasional itu sangat jelas, yaitu perdagangan bebas, pengurangan intervensi negara pada bidang sosial dan ekonomi, kerjasama antar kelas, serta perlawanan terhadap sosialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.²⁹ Puncak perhelatan demokrasi korporasi multi nasional itu adalah penyerahan kedaulatan negeri ini oleh Soeharto tidak kepada rakyat tapi pada direktur IMF, saat itulah kedaulatan rakyat dirampas oleh korporasi kapitalis.

Demokrasi dan hak asasi manusia, serta pemikiran keagamaan yang digunakan untuk mendukung gerakan tersebut sebagaimana yang digerakkan oleh Abdurraman Wahid, Masdar F Mas'udi beserta generasi berikutnya, akhirnya mengalami kebuntuan, sejalan dengan kebuntuan agenda demokrasi dan reformasi yang menjadi ruh gerakan mereka. Walaupun diskusi tetap dilanjutkan tetapi tidak ada kemajuan, tidak pula pendalaman, bahkan cenderung mengalami pendangkalan, apalagi perubahan tema seringkali terjadi sedemikian cepat, ketika bicara demokrasi belum selesai, persoalan

reproduksi menyusul, sementara agenda tentang korupsi sudah lama menanti, itupun masih ada keharusan bicara soal pluralisme, ketika tema itu lagi giat diomongkan soal terorisme muncul dan sangat mendesak untuk dibicarakan. Karena tidak ada pengendapan, tanpa refleksi, semuanya tidak tumbuh menjadi gerakan, hanya gerak-gerik sebagai perbincangan elitis.

Agenda neo-liberal merasuk sedemikian dalam, dan belum ada evaluasi sama sekali. Akibatnya agenda NU tidak ada yang jalan sedemikian juga manhaj pemikiran NU yang pernah dibangun menjadi terabaikan. Tidak hanya itu, persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan dan persoalan kerakyatan yang selama ini menjadi agenda abadi NU telah terlupakan. Pemikiran besar-mendasar (*ushul*) telah diganti dengan pemikiran *furu'* (teknis). Masalah besar tentang hilangnya martabat bangsa tidak pernah lagi dipersoalkan. Demikian juga hilangnya kedaulatan negara RI juga tidak pernah diperbincangkan lagi. Kekacauan konstitusi serta dikaburkannya Pancasila sebagai ideologi negara tak pernah diatasi. Padahal NU telah menyatakan Pancasila sebagai asas organisasinya. Malah masuk ke persoalan *furu'* yang seolah baik tapi sangat manipulatif, seperti desentralisasi, *good governance*, soal *public policy*, transparansi, dan sebagainya.

²⁹ Lihat Note of the Natinal Endowment for Democracy, USA, 1980.

Hilangnya tema sentral mengenai persoalan-persoalan dasar semacam itu juga berakibat pada hilangnya tradisi berpikir mendasar, berpikir reflektif. Pemikiran yang mendalam dan cemerlang akhirnya tidak lagi muncul. Pemikiran yang muncul serba permukaan dan serba sepiantas. Keengganan belajar dari sejarah, baik sejarah Nusantara lama, sejarah Walisongo, bahkan sejarah proses pembentukan dan pengembangan NU sendiri, membuat generasi baru NU ini mengalami disorientasi, sehingga semua bisa dilakukan, tidak ada lagi konsistensi sejarah maupun konsistensi ideologis.

Liberalisme, imperialisme, dan sekularisme yang dulu dianggap tabu, belakangan malah menjadi identitas yang dibanggakan. Pengembangan pemikiran yang hanya mengekor tanpa arah itu mengakibatkan pemikiran NU belakangan ini mengalami jalan buntu, bersamaan dengan runtuhnya otoritas paradigma modernisasi beserta turunannya. Apalagi pemikiran yang dikembangkan tersebut terbukti berwatak kolonial. Sementara itu pemikiran Islam puritan juga sudah mulai merasuk ke dalam lingkungan NU. Kalau kedua kecenderungan itu dibiarkan, tradisi NU yang moderat dan toleran baik terhadap agama dan tradisi lokal akan lenyap. Padahal NU hadir untuk menciptakan alternatif dari kedua ekstrem yang ada.



Jauh sebelumnya KH Ahmad Shiddiq telah memperingatkan bahwa NU ibarat kereta yang punya rel sendiri, bukan seperti taksi yang bisa dibawa ke mana-mana sesuai keinginan penumpangnya. Bukan pula seperti koper yang bisa diisi apa saja oleh pembawanya.³⁰ Peringatan pertama ditujukan pada Orde Baru yang hendak memblokir khittah NU, peringatan kedua ditujukan kepada para aktivis NU sendiri yang mulai gigih hendak dan telah memasukkan berbagai paradigma luar ke dalam komunitas NU tanpa seleksi dan modifikasi. KH Ahmad Shiddiq merasa bahwa koper NU saat itu memang telah penuh dengan paradigma pemikiran *gharib* (asing), baik yang dibawa Abdurrahman Wahid, aktivis, dan teknokrat sosial lainnya, padahal para kiai

³⁰ Ingat kembali Khutbah iftitah KH Ahmad Shiddiq pada Muktamar NUKe- 27 di Yogyakarta, 1989.

seperti KH Mahfud Shiddiq telah menyediakan berbagai pedoman gerakan sosial seperti *mabadi' khairu ummah* berdasarkan prinsip Aswaja.

Pedoman itu tidak pernah secara sungguh-sungguh dirujuk, sebaliknya modul dan instrumen yang instan yang dibawa dari luar lebih banyak digunakan di pesantren. Tampaknya orang yang paling peka terhadap akan munculnya kecenderungan itu adalah KH. As'ad Syamsul Arifin, di tengah perkembangan yang begitu bersemangat dan dinamis, tiba tiba memaksakan Anwar Nuris duduk sebagai Sekjen PBNU, orang lama yang dianggap tidak cakap, sehingga membuat jengah semua orang. Padahal posisi itu mestinya dijabat oleh para teknokrat sosial yang terampil. Langkah itu bukan untuk menghadang, tetapi sekadar untuk mengimbangi gerakan Abdurrahman Wahid agar dinamika kiai pesantren dengan sistem salafnya bisa terus berkembang.

Pengembangan NU, termasuk pengembangan *manhaj* berpikirnya, tentu tidak bisa mengabaikan perkembangan yang terjadi di luar. Tetapi penggunaannya mesti selektif dan kreatif disertai kemampuan memodifikasi agar punya daya sui. Penggunaan teori dan metodologi dari luar mesti bersifat sukarela bukan paksaan, pengambilan tradisi dari luar yang tanpa paksaan baik yang bersifat politis maupun akademis itu, akan menjadikan NU mampu menggunakan secara proporsional. Kreativitas tidak pernah muncul dalam suasana memaksa. Adanya pemaksaan agenda itulah yang menumpulkan kreativitas pemikiran selama ini. NU harus

dimandirikan secara politik dan diswadayakan secara ekonomi agar bisa otonom dalam berpikir.

Demikian juga kemandirian dalam berpikir penting dilakukan agar mampu mandiri dalam politik dan ekonomi. Kemandirian berpikir itu dimulai dengan kemandirian dalam merumuskan falsafah dan *manhaj* berpikirnya. Di situlah perumusan kembali *manhaj* pemikiran menjadi penting agar koper (khazanah pemikiran NU) tidak diisi secara sembarangan oleh pembawanya, apalagi diisi dengan paradigma dan metode yang bertentangan dengan tradisi Ahlussunnah Waljama'ah, sebagaimana diperingatkan KH Ahmad Shiddiq. Kalau NU hanya mengikuti agenda serta paradigma yang datang dari luar, NU tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau mampu merumuskan agendanya sendiri dan menjalankan dengan *manhajnya* sendiri, NU justeru akan mampu berhadapan dengan paradigma lain secara lebih percaya diri. Peradaban dan paradigma lain termasuk dari Barat bukan sesuatu yang tabu, tetapi penerimaannya yang perlu dilakukan secara kreatif, selektif, dan proporsional. Dengan cara seperti itu, NU memberikan kontribusi pada bangsa ini dan bangsa yang lain. Apalagi ketika masyarakat dan negara runtuh akibat runtuhnya paradigma yang digunakan, semestinya NU tidak sampai ikut runtuh, sebaliknya bisa tampil memberika alternatif, ketika tradisi NU yang dianggap usang kembali menjadi relevan.

Agar NU mampu mengembangkan pemikirannya yang khas dan relevan bagi

situasi Indonesia saat ini, maka harus mampu menerjemahkan kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyah* yang ada menjadi metode pengembangan pemikiran, baik keagamaan maupun sosial. Demikian juga dituntut untuk mampu menerjemahkan prinsip *mabadi' khairu ummah* itu menjadi modul dalam pengembangan masyarakat. Demikian juga metode penulisan sejarah NU sudah saatnya dirumuskan kembali agar metode yang ada mampu melihat dan menjelaskan serta memaknai perkembangan yang terjadi di NU secara tepat dan proporsional.³¹

Penutup

Bahwa sesungguhnya bentuk normatif *manhaj* pemikiran NU telah ditulis dengan baik oleh KH. Ahmad Shiddiq maupun oleh KH. Muchith Muzadi. Sementara mengenai sejarah pembentukannya serta pengembangannya dalam konteks sejarah NU dan Nusantara belum banyak dibicarakan. Padahal para ulama NU dalam mengembangkan pemikiran

selain merujuk pada kitab yang dianggap muktabarah, tetapi selalu merujuk pada pengalaman para ulama Nusantara terdahulu. *Turats* (warisan) serta pengalaman masa lalu menjadi salah satu *manhaj* penting dalam pengembangan pemikiran NU, karena itu kajian sosiologi pengetahuan serta sejarah pemikiran menjadi sangat penting.

Manhaj pemikiran NU tentu saja tidak semuanya bisa disederhanakan dalam sebuah pointer, sebaliknya akan bisa lebih komprehensif bila dijelaskan dalam bentuk pemaparan historis, proses pemahaman penerapan, serta pengembangannya. Tradisi pemikiran Ahlus-sunnah Waljama'ah yang telah bergumul dengan pengalaman riil sepanjang sejarah Nusantara serta berbagai bentuk modifikasinya sesuai dengan pemikiran kontemporer itulah kalau mau menyebut *manhaj* pemikiran NU. Tentulah pembahasan ini sangat berkaitan dengan upaya menerobos kebuntuan serta mengatasi involusi. ❖

³¹ Abdul Mun'im DZ, *Pengantar Historiografi NU*, h. 32